



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERTUMBUHAN LIKUIDITAS PEREKONOMIAN SEBESAR 5,7 PERSEN PER FEBRUARI 2025

Muhammad Insan Firdaus
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2025 sebesar 5,7 persen *year on year* (yoy), mencapai Rp9.239,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari 2025 yang sebesar 5,5 persen yoy, menunjukkan tren positif dalam perekonomian nasional. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,4 persen yoy dan uang kuasi sebesar 1,8 persen yoy, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin bergerak. Meskipun masih ada tantangan, peningkatan likuiditas ini memberikan sinyal optimis bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan M2 pada Februari 2025 terutama didukung oleh dua faktor kunci, yaitu penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit tumbuh 9 persen yoy, dengan kredit korporasi melonjak signifikan sebesar 14,7 persen yoy dan kredit perorangan naik 2,7 persen yoy. Sektor-sektor seperti keuangan, *real estate*, industri pengolahan, serta listrik, gas, dan air bersih menjadi penyumbang utama pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 13 persen yoy. Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh 9,4 persen yoy, didorong oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan konsumen. Aktiva luar negeri bersih juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,1 persen yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari yang sebesar 2,4 persen yoy. Meskipun tagihan bersih kepada pemerintah pusat berkontraksi 5,7 persen yoy, hal ini masih lebih baik dari kontraksi 14,1 persen yoy pada Januari. Uang primer (M0 *adjusted*) tumbuh 13 persen yoy, dengan uang kartal naik 9,8 persen yoy dan giro bank umum di BI *adjusted* meningkat 5,1 persen yoy, menandakan likuiditas yang semakin kuat.

Peningkatan likuiditas ini memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi, meskipun masih perlu dicermati lebih lanjut. Piter Abdullah Redjalam, Direktur Eksekutif Segara *Institute*, mengakui bahwa peningkatan uang beredar tidak selalu langsung mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa ini adalah langkah awal yang positif. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menambahkan bahwa pertumbuhan M2 saat ini kemungkinan besar didorong oleh faktor musiman, terutama menjelang Lebaran, di mana permintaan uang cenderung meningkat karena kebutuhan konsumsi rumah tangga, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), dan peningkatan transaksi perdagangan. Meskipun sebagian besar likuiditas masih tersimpan di sistem perbankan, hal ini menunjukkan potensi untuk diserap ke sektor riil dalam waktu dekat.

Meskipun daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, masih menghadapi tantangan, peningkatan likuiditas ini memberikan dasar yang kuat untuk pemulihan ekonomi yang lebih luas. Prediksi jumlah pemudik dan perputaran uang selama Lebaran 2025 mungkin lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi peningkatan likuiditas dan penyaluran kredit menunjukkan bahwa perekonomian mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Untuk memastikan bahwa tren positif ini berkelanjutan, pemerintah dan otoritas moneter perlu terus memantau dinamika inflasi, penyaluran kredit, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025. Jika faktor-faktor ini menunjukkan perbaikan yang konsisten, pertumbuhan M2 dapat menjadi indikator kuat bagi pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan likuiditas perekonomian Indonesia pada Februari 2025 adalah kabar baik yang patut diapresiasi. Meskipun masih ada tantangan, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat, langkah-langkah positif seperti pertumbuhan kredit, peningkatan aktiva luar negeri bersih, dan stabilitas uang primer menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menuju pemulihan. Dengan kebijakan yang tepat dan konsistensi dalam menjaga momentum positif ini, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif di masa mendatang.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk menindaklanjuti peningkatan likuiditas perekonomian. *Pertama*, melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran kredit perbankan untuk memastikan alokasinya tepat sasaran, terutama ke sektor-sektor produktif seperti Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya. *Kedua*, mendorong koordinasi antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan likuiditas terserap ke sektor riil, bukan hanya tersimpan di sistem perbankan. *Ketiga*, mengkaji kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mendorong daya beli masyarakat, seperti insentif pajak atau program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. *Keempat*, memantau perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkala untuk mengantisipasi risiko ketidakseimbangan makroekonomi. *Terakhir*, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah untuk memastikan likuiditas berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber

antaranews.com, 21 Maret 2025;
bisnis.com, 22 Maret 2025;
cnnindonesia.com, 21 Maret 2025;
kompas.com, 21 Maret 2025;
kontan.co.id, 21 Maret 2025;
tempo.co, 23 Maret 2025.

Minggu ke-3 Maret
(17 s.d. 23 Maret 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making